



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggai Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 31 Januari 2020/Periodik - 2019)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
UNIT KERJA : DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
SUB UNIT KERJA : UPTD BALAI KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN MARIA DONGGOMASA

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **AHYAR**
2. Jabatan : **KEPALA UNIT**
3. NHK : **443616**

II. DATA HARTA**A. TANAH DAN BANGUNAN**

Rp.

2.279.880.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 350 m2/250 m2 di KAB / KOTA KOTA BIMA , HASIL SENDIRI Rp. 525.000.000
2. Tanah Seluas 5000 m2 di KAB / KOTA BIMA, HASIL SENDIRI Rp. 70.000.000
3. Tanah Seluas 13000 m2 di KAB / KOTA BIMA, HASIL SENDIRI Rp. 50.000.000
4. Tanah Seluas 400 m2 di KAB / KOTA BIMA, WARISAN Rp. 80.000.000
5. Tanah Seluas 500 m2 di KAB / KOTA BIMA, WARISAN Rp. 75.000.000
6. Tanah Seluas 8000 m2 di KAB / KOTA BIMA, HASIL SENDIRI Rp. 90.000.000
7. Tanah Seluas 600 m2 di KAB / KOTA BIMA, HASIL SENDIRI Rp. 90.000.000
8. Tanah Seluas 1151 m2 di KAB / KOTA BIMA, HASIL SENDIRI Rp. 184.160.000
9. Tanah Seluas 1192 m2 di KAB / KOTA BIMA, HASIL SENDIRI Rp. 190.720.000
10. Tanah dan Bangunan Seluas 4000 m2/84 m2 di KAB / KOTA KOTA BIMA , HASIL SENDIRI Rp. 475.000.000



11. Tanah dan Bangunan Seluas 90 m²/45 m² di KAB / KOTA KOTA MATARAM , HASIL SENDIRI Rp. 450.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 250.000.000

1. MOBIL, MITSUBISHI PAJERO SPORT DAKAR VGT Tahun 2014, HASIL SENDIRI Rp. 250.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 32.450.000

D. SURAT BERHARGA Rp. ---

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 30.350.679

F. HARTA LAINNYA Rp. 100.000.000

Sub Total Rp. 2.692.680.679

III. HUTANG Rp. 13.650.000

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 2.679.030.679

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini diumumkan dengan catatan **LENGKAP** berdasarkan hasil verifikasi tanggal **9 April 2020**.
4. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.